



INTISARI

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGANI PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNG UNDANG-UNDANG (ASPEK HUKUM KONSERVASI SATWA DI INDONESIA)

Ryan Meinardy

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Indonesia termasuk kedalam negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Kepunahan satwa liar disebabkan berkurang dan rusaknya habitat serta adanya perburuan dan perdagangan satwa ilegal. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam upaya untuk mengurangi kepunahan satwa liar. Bentuk upaya pemerintah antara lain dengan adanya undang-undang yang melindungi keberadaan satwa liar serta terlibatnya Indonesia dalam beberapa organisasi yang peduli terhadap keberlangsungan satwa liar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai perlindungan satwa liar yang dilindungi undang-undang dari perburuan dan perdagangan ditinjau dari aspek kebijakan konservasi sumber daya alam hayati yang berlaku dan mengetahui penegakkan hukum oleh pemerintah dalam memerangi perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif menggunakan analisis secara kualitatif dari peraturan perundang-undangan yang ada, doktrin, dan teori-teori hukum yang ada. Penelitian hukum empiris dilakukan pada data primer yang diperoleh dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian kebijakan yang mengatur perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia diatur dalam UU No 5 Tahun 1990. Penegakkan hukum dilakukan pemerintah dengan dibentuknya Polhut dan menindak tegas pelaku perburuan dan perdagangan satwa ilegal sesuai dengan UU yang berlaku.

Kata kunci: satwa liar, konservasi, perburuan dan perdagangan satwa liar, undang-undang



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGANI PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG
DILINDungi UNDANG-UNDANG
(ASPEK HUKUM KONSERVASI SATWA DI INDONESIA)
RYAN MEINARDY, Totok Dwi Diantoro S.H.,M.A.,LL.M.

Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

ABSTRACT

GOVERNMENT EFFORTS IN ADDRESSING THE HUNT AND PROTECTED WILDLIFE TRADE LAW (LEGAL ASPECTS OF WILDLIFE CONSERVATION IN INDONESIA)

Ryan Meinardy

Indonesia is a country rich in biodiversity. Indonesia belongs to a country that has a long list of endangered wildlife. The wildlife is all the animals that live on land, water or air and still have the wild nature, both free-living and are maintained by humans. Extinction of wildlife and habitat destruction caused reduced as well as the poaching and illegal wildlife trade. Indonesian Government undertaking various efforts to reduce the extinction of wildlife. Governmental efforts among others with the laws that protect the existence of wildlife as well as the involvement of Indonesia in some organizations that care about the sustainability of wildlife. The purpose of this research is to know and understand about the wildlife protection laws of hunting and the trade in terms of both policy and conservation of natural resources and determine the applicable rule of law by the government in the fight against poaching and illegal wildlife trade are protected by the enactment act.

In this study, using the method of normative and empirical legal research. Normative legal research using qualitative analysis of laws and regulations that exist, doctrines, and theories of existing law. Empirical legal research conducted on primary data collected in the field.

Based on the results of research policies governing the protection of biodiversity in Indonesia is regulated by law No. 5 of 1990. The government's law enforcement with the establishment of forest police and firm action against perpetrators of poaching and illegal wildlife trade in accordance with applicable law.

Key words: **wildlife, conservation, poaching and illegal wildlife trade, legislation**